**BAB II**

**Kebijakan Indonesia dalam Pemberantasan *Illegal Fishing***

1. ***Illegal Fishing***

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk meyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komsi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkotika, *illegal loging*, *illegal fishing,* dan *illegal minning* serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008).[[1]](#footnote-1) Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.[[2]](#footnote-2) *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing[[3]](#footnote-3). *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* pada prinsipnya merupakan salah satu pengertian “*Illegal, unregulated, and Unreported Fishing’* (IUU) artinyaa penangkapan ikan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.[[4]](#footnote-4)

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported,* dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ad, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.[[5]](#footnote-5)

Menurut International Plan Of Action (IPOA) yang diprakarsai oleh FAO, IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) atau yang belum, dan tidak diatur (*unregulated*) di Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI):

* Penangkapan ikan illegal (*illegal fishing*) adalah Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP-RI tanpa izin atau bertentangan dengan perarturan perundang-undangan yang berlaku.
* Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) adalah Kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
* Penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) adalah Kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau sediaan ikan di WPP-RI yang belum diterapkan sesuai ketentuan pelestarian dan pengelolaan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.[[6]](#footnote-6)

Dampak atau kerugian yang dapat terjadi akibat *IUU fishing* bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Dampak/ Kerugian Ekonomi, Terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek *IUU fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunaka di dalam menghitung kerugian tersebut.
2. Dampak Sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan skala yang lebih besar; menurunnya hasil tangkapam per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya; penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengolahan ikan.
3. Dampak terhadap Ekologi/ Lingkungan, seperti: kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat penggunaan alat tangkap yang *eksplotatif* dan tidak ramah lingkungan; *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI.

Di samping kerugian tersebut, terdapatnya erugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *IUU fishing*, diantaranya:[[8]](#footnote-8)

1. Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralihnya mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usah lain, teramasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigran gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.
3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri pengolahan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.
4. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.[[9]](#footnote-9)

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:[[10]](#footnote-10)

* + 1. Penangkapan ikan tanpa izin,
    2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu,
    3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang,
    4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

*Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:[[11]](#footnote-11)

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instasi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

*Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:[[12]](#footnote-12)

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya.[[13]](#footnote-13)

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Sementara itu, undang-undang positif mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang perikanan sebagai berikut.

1. Kejahatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan “kejahatan” sesuai Pasal 103 sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1)).
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan (Pasal 84 ayat (2)).
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahan perikanan, pertanggung jawab perusahan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan (Pasal 84 ayat (3).
4. Pemilik perusahan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahan pembudidayaan ikan, dan/atau pertanggung jawab perusahan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan (Pasal 84 ayat (4)).
5. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sabagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 85).
6. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 86 ayat (1)), membudayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2)), membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3)), menggunakan obet-obatan dalam pembudidayan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)),
7. Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88),
8. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makan, bahan penolong, dan/atau alat lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 91).
9. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92).
10. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (Pasal 93 ayat (1)).
11. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93 ayat (2)).
12. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Neraga Republik Indonesi, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (3)).
13. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).
14. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) (Pasal 94).
15. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SUIP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A (Pasal 94A).
16. Pelanggaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengidentifikasi tindak pidana yang dikategorikan sebagai “Pelanggaran” sesuai 103 adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (2)).
2. Setiap orang yang melakuka penanganan dan pengelolaan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89).
3. Setiap orang yang sengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 90).
4. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang yidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
5. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
6. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyiman alat penangkapan ikan dalam palka (Pasal 97 ayat (1)) yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat peangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2)), yang telah memiliki izin alat penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3)).
7. Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Pasal 98).
8. Setiap orang asing yang melakukkan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah (Pasal 99).
9. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (Pasal 100), yaitu setiap orang yang melakukan dan/atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
   1. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
   2. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
   3. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
   4. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
   5. Sistem pemantauan kapal perikanan;
   6. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
   7. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
   8. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
   9. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkunganny;
   10. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
   11. Suaka perikanan;
   12. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
   13. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
   14. Jenis ikan yang dilindungi.

*Illegal Fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan.

Sebagai mana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009 mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa: “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran.

Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat oeleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*. Dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada pelanggaran atau kejahatan pencurian ikan yang dilakukkan oleh nelayan asing.

1. Perundang-undangan tentang Kelautan dan Perikanan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebelumnya urusan perikanan berada dibawah Departemen Pertanian dan Peternakan. Pemisahan di sektor kelautan ini diharapkan dapat menjadi penggerak dibidang ekonomi, sekaligus bukti perhatian perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan.

Lembaga baru yang khusus mengurus sektor kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seorang mentri yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada. Berikut ini adalah perkembangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kelautan dan perikanan.

* + 1. Legislasi

1. Undang-Undang Dasar 1945

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam Pasal 33, antara lain berbunyi sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan nasional indonesia, mengingat pembangunan ekonomi mempunyai arti strategis bagi pembangunan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi diatas.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik tentang tindak kejahatan perikanan. Yang ada hanya mengatur tentang kejahatan pelayaran dan tentang pelanggaran pelayaran. Kejahatan pelayaran diatur dalam KUHP Pasal 438-479, sedangkan pelanggaran pelayaran diatur dalam Pasal 560-569. Kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran hanya mengatur tentang tindak kejahatan pembajakan kapal dilaut, ditepi laut, dipantai dan disungai, serta kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang nahkoda.[[17]](#footnote-17)

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia. dalam konvensi Hukum Laut Ketiga 1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan laut lepas. Pada konverensi PBB ke-III tentang Hukum Laut Tahun 1973-1982, masalah pengaturan ZEE adalah salah satu isu yang banyak dibahas dan diwarnai perbedaan pendapat. Ini dikarenakan ZEE sebagai rezim baru yang sebelumnnya tidak dikenal dalam hukum laut, dimana pengaturannya menimbulkan perubahan mendasar dalam pembagian tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang sifatnya terbuka untuk semua egara. Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukan telah diakuinya rezim zona ekonomi ekslusif selebar 200 (dua ratus) mil sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indoneisa.”[[18]](#footnote-18)

Dalam wilayah ini Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat hak-hak lain, yuridiksi, dan kewajiban-kewajiban, antara lain:[[19]](#footnote-19)

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitas, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air laut diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin:
2. Yuridiksi yang berhubungan dengan:
   1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, serta bangunan-bangunan lainnya;
   2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
   3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Hak dan kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Ekslusif, antara lain sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

1. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau persetujuan internasional (Pasal 5 ayat (1)).
2. Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2)).
3. Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan, jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya (Pasal 5 ayat (3)).
4. Membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut (pasal 6).
5. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEE Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 7).
6. Melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut (Pasal 8 ayat (1)).
7. Pembuangan di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Covention on The Law of Sea* (UNCLOS)

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on The Law of Sea* (Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Konvensi itu telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia di Montenegro Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.[[21]](#footnote-21)

Dibandingkan dengan Konvensi Janewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tersebut mengatur rezim-rezim huku laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rezim-rezimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya, konvensi PBB tentang Hukum Laut mengatur sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

* + - 1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Terirorial;
      2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriterian Landas Kontinen. Menurut Konvensi Janewa 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (*natural prologation of its lan territory to the outer edge of continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mecapai jarak 200 mil laut tersebut.
      3. Sebagian melahirkan rezim-rezim hukum baru, seperti asas Negara kepulauan ZEE, serta penambangan di Dasar Laut Internasional.

Bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang selama 25 tahun secara terus-menerus diperjuangkan oleh Indonesia yang telah berhasil memperoleh pengakuan resmi maysrakat internasional. pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “negara kepulauan” menurut konvensi ini adalah uatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih gugusan kepualauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau tersebut, dan lain-lan wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya. Dengan demikian, dudusan pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.[[23]](#footnote-23)

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia. dala undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

* 1. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
  2. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  3. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaaknya dari pantai.
  4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Yang dimaksud dengan kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa Indonesia mengakui hak lintas bagi kapal-kapal asing, meliputi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, dan hak akses dan komunikasi. Mengenai penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional.[[25]](#footnote-25)

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Produk hukum ini adalah peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan yang perlu dilakukkan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah “semua jenis ikan biota perairan lainnya”.[[26]](#footnote-26) Selanjutnya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

* 1. Perairan Indonesia
  2. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
  3. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat dibedakan menjaadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal ini yang termasuk kejahatan adalah sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
3. Barang siapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.

Sementara itu yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

1. Barang siapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan tanpa izin.
2. Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasa 4, yaitu tentang:
   * 1. Alat-alat penangkapan ikan;
     2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
     3. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan pelayaran;
     4. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran yang tidak boleh ditangkap;
     5. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan;
     6. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
     7. Penebaran ikan jenis baru;
     8. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
     9. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
     10. Hal-hal yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.
   1. Barang siapa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 28 yaitu “Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua subjek tindak pidana dalam undang-undang ini, yaitu orang dan bada hukum.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai “perikanan” memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang terdahulu yaitu: “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.[[30]](#footnote-30)

Definisi mengenai “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang mana di undang-undang sebelumnya tidak disebutkan, bahwa “ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Makna ikan dalam undang-undang ini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sekedar spesies ikan, tapi semua organisme yang hidup di lingkungan perairan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, memunculkan subjek hukum baru, yaitu subjek hukum “korporasi”. Definisi atau konsep “korporasi’ diartikan sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum.” Konsep ini sama dengan konsep korporasi yang terdapat dalam semua undang-undang tentang tindak pidana khususnya mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Ada dua kategori tindak pidana dalam undang-undang perikanan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang mana dirumuskan secara kompleks dan bervariasi daripada undang-undang sebelumnya. Hal ini dikarenakan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran talah banyak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982, yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbaras dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan beruaya terbatas (*stradding fish*), serta jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*). Pada tahun 1995 PBB telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam *agreement* yang disebut *United Nation Implementing Agreement* (UNIA) Tahun 1995.

UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingan UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.

Persetujuan ini berlaku untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di luar wilayah yuridiksi nasional, hal ini ditegaskan dalam undang-undang ini Pasal 3 ayat (1).

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang ini hadir tidak untuk menghapus undang-undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupunaspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yuridiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan untuk Undang-Undang tersebut yang meliputi sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme joordinasi antarinstansi penyelidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda). Hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan., terasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan, antara lain kepelabuhan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
3. Diperlukan perluasan yuridiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
   * 1. Regulasi

Selain undang-undang tersebut, masih banyak peraturan dibawah undang-undang yang mengatur mengenai kelautan dan perikanan yang sifatnya teknis, antara lain:[[32]](#footnote-32)

* + - * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
        2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
        3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
        5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
        6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
        7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
        8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.
        9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan.
        10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
        11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya bagi Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.
        12. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara.
        13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara.
        14. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewa Kelautan Indonesia .
        15. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jabatan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Perikanan.
        16. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tiga Pengadilan Perikanan, yaitu Pengdilan Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, PN Sorong, dan PN Merauke.
        17. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
        18. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
        19. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SKKP).
        20. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
        21. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

1. Asas Berlakunya Peraturan Perundan-Undangan untuk Menyelesaikan Konflik Norma Bidang *Illegal Fishing* di Indonesia.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), maka peraturan yang berlaku adalah produk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perikanan. Mengingat ada dua produk perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan yang saat ini berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka berlaku *asas lex pesteriori derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Sangat banyak produk perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang perikanan. Untuk itu berlaku asas *lexpesterioriti derogate legi superioriti*, yaitu hukum yang dibuat penguasa yang kedudukannya lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang dibuat oleh penguasa yang sama tetapi kedudukannya lebih rendah, apabila melenceng dari asas dan kaidah hukum yang mengatur hal serupa dalam konteks berbeda.

Selain itu ada asas *Hierarki* atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam suatu negara untuk menjaga tertib hukum harus ada penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan.[[33]](#footnote-33)

Dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada pelanggaran atau kejahatan pencurian ikan yang dilakukkan oleh nelayan asing. Dimana akan menjelaskan tentang kebijakan indonesia dalam pemberantasan *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina.

* + 1. **Upaya Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan *Illegal Fishing***

Masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia merupakan suatu ancaman yang dapat menganggu stabilitas keamanan negara, khususnya keamanan laut. Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensial sumberdaya perikanan yang cukup besar mengakibatkan permasalahan *illegal fishing* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji.

Beberapa tahun terakhir ini praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dimana semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki sumberdaya perikanan yang cukup potensial. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah *illegal fishing,* yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tantang Perikanan. Namun implementasi dari Undang-Undang tersebut belum begitu efektif karena semakin kompleksnya masalah *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mau tinggal diam menghadapi masalah ini, guna menekan tingkat kejahatan di perairan Indonesia.[[34]](#footnote-34)

Upaya pemberantasa *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan dengan pendekatan *soft structure* dan *hard structure*.[[35]](#footnote-35)

1. Upaya *soft structures*

Upaya *soft structures* yang dilakukan Indonesia antara lain meliputi:

1. *Review* dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan mandat *International Plan Of Action* (IPOA), pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan *National Plan of Action* (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan *IUU Fishing* 2012-2016, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 50 tahun 2012 tentang NPOA 2012-2016. Rencana Aksi ini akan direviu dan disempurnakan setiap 4 (empat) tahun sekali, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan straegis yang terjadi.
2. Pada akhir tahun 2014, Kementerian Kelautan da Perikanan telah menerbitkan 2 (dua) regulasi yang bertujuan mencegah dan memberantas praktek-praktek *IUU fishing*, yaitu:
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN-KP Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di EPP NRI yaitu Penghentian alih muatan (*transhipment*) di tengah laut.
5. Penguatan dan pengembangan unit-unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT-PSDKP).
6. Penguatan Kapasitas pengawas perikanan dan PPNS perikanan
7. Kerjasama Regional:
8. Menjadi anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*/RFMOs). Saat ini Indonesia telah menjadi anggota penuh dari beberapa RFMOs, yaitu: *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Convention of Conservation on Southern Blufin Tuna* (CCSBT), dan *West and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).
9. Bersama-sama dengan 10 Negara ASEAN plus Australia membentuk *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Pratices Including Combating IUU Fishing in the Region* (RPOA-IUU), dan sejak pembentukannya di tahun 2007, Indonesia bertindak selaku koordinator Sekretariat RPOA-IUU.
10. Menggalang kerjasama bilateral dengan Australia dalam Pemberantasan *IUU fishing* diwujudkan dalam fora Indonesia-Australia *Fisheries Surveilance Forum (IAFSF).*
11. Berpartisipasi aktif dalam fora-fora Perikanan Regional dan Internasional (ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC, COFI-FAO).
12. Menerapkan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan (*conservation and management measures/CMM*), dan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti *European Commision Reulation* no. 1005/2008, mengupayakan meratifikasi *Port State Measures Agreement/*PSMA,dll).
13. Upaya *Hard Structures*

Upaya *Hard Structures* yang dilakukan Indonesia antara lain meliputi:

1. Mengimplementasikan *monitoring, control and surveillance* (MCS) secara konsisten, termasuk menerapkan system pemantauan kapal (*Vessel Monotoring System/VMS*), mendorong ketentuan tentang *oserver onboard,* penerapan *logbook,* meningkatkan *port Inpection*, bersama-sama Ditjen Perikanan Tangkap membangun *Database Sharing System* (DSS).
2. Melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan:  *before fishing, while fishing, during fishing, and post landing,* sebagaimana *MCS Technical Guidelines.*

***Monitoring***, mencakup kegiatan pengumpulan, peraturan dan analisis menangkapan ikan dan kegiatan ang terkait lainnya, namun tidak terbatas pada hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha penangkapn, hasil sampingan dari penangkapan ikan (*by catch*), hasil tangkapan yang dibuang (*discars*) dan wilayah operasi penangkapan ikan.

***Control***, berkaitan dengan pembentukan aturan yang terdiri dari spesifikasi syarat dan ketentuan dimana sumber daya ditangkap.

***Surveillance***, melingkupi kegiatan-kegiatan pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait dan memastikan aturan nasional, syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan diobservasi.

1. Membangun sarana dan prasarana pengawasan
2. Mendorong pengembangan *Integrated Surveillance System*, termasuk menggalang pertukaran data informasi antar instansi terkait.
3. Memfasilitasi dan membina kelompok masyarakat pengawas (POKMAWAS).
4. Melaksanakan operasi gabungan pengawasan di laut dengan institusi-institusi terkait (BAKORKAMALA, TNI-AL, dan POLAIR).
5. Pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia melibatkan beberapa unit teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berbagai institusi penegak hukum lainnya.
6. Menyelenggarakan *coordinated patrol* dengan beberapa negara tetangga (Australia, Malaysia, Singapura).
7. Bersama-sama Mahkamah Agung, membangun 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di [Pengadilan Negeri Jakarta Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri_Jakarta_Utara" \o "Pengadilan Negeri Jakarta Utara),[Pengadilan Negeri Medan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Medan&action=edit&redlink=1), [Pengadilan Negeri Pontianak](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Pontianak&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Pontianak (halaman belum tersedia)), [Pengadilan Negeri Bitung](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Bitung&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Bitung (halaman belum tersedia)), dan [Pengadilan Negeri Tual](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Tual&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Tual (halaman belum tersedia)). Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di [Pengadilan Negeri Tanjung Pinang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Tanjung_Pinang&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (halaman belum tersedia)) dan [Pengadilan Negeri Ranai](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Ranai&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Ranai (halaman belum tersedia)). Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2010, Pengadilan Perikanan juga dibentuk di [Pengadilan Negeri Ambon](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Ambon&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Ambon (halaman belum tersedia)), [Pengadilan Negeri Sorong](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Sorong&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Sorong (halaman belum tersedia)) dan [Pengadilan Negeri Merauke](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Merauke&action=edit&redlink=1" \o "Pengadilan Negeri Merauke (halaman belum tersedia)). Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum [Pengadilan Negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri" \o "Pengadilan Negeri).
8. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perikanan, dengan kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal.
   * 1. **Kebijakan Indonesia dalam Pemberantasan *Illegal Fishing*.**

Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional .

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi menganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara.

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *Illegal Fishin*g yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Upaya nyata pemberantasan praktik *Illegal Fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan laksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Akibat perbuatan pelaku *Illegal Fishing* setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia.

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *Illegal Fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penengggelaman kapal asing pelaku *Illegal Fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya.

Tindakan tegas berupa penenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

1. Faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau Ide para pembuat hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*).[[36]](#footnote-36)

Keberhasilan dalam penegakan hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Friedmen, membagi sistem hukum kedalam tiga komponen utama yakni;[[37]](#footnote-37)

1. Struktur Hukum (Lembaga Penegak Hukum)
2. Substansi Hukum (peraturan perundangan); dan
3. Kultur Hukum. Baik Internal legal culture (polisi, Jaksa, hakim, pengacara) atau external legal culture (masyarakat).

Dari tiga komponen diatas, sturktural hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum.

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga nilai dasar hukum sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch yaitu Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.[[38]](#footnote-38)

1. Kepastian hukum, artinya dalam memberikan putusan hukum seorang hakim harus berdasarkan adanya peraturan.
2. Keadilan, artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta hukum yang tergali dalam persidangan.
3. Kemanfaatan hukum, artinya putusan hakim harus dapat memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah.

Hakim dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bertentangan dan dapat menimbulkan masalah maka nilai keadilan haruslah diutamakan karena hukum dibentuk untuk memberikan keadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Artinya hakim dalam memutus sebuah perkara harus didasarkan pada nilai ketuhanan seperti jujur, adil dan benar. Karena putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[[39]](#footnote-39)

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menjalankan peraturan perundangan saja dalam memutus perkara melainkan juga harus memperhatikan nilainilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat.[[40]](#footnote-40)

1. Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*

Instruksi Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku *Illegal Fishing* yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.[[41]](#footnote-41)

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelas disebutkan bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran’ dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarka bukti permulaan yang cukup.[[42]](#footnote-42)

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.[[43]](#footnote-43)

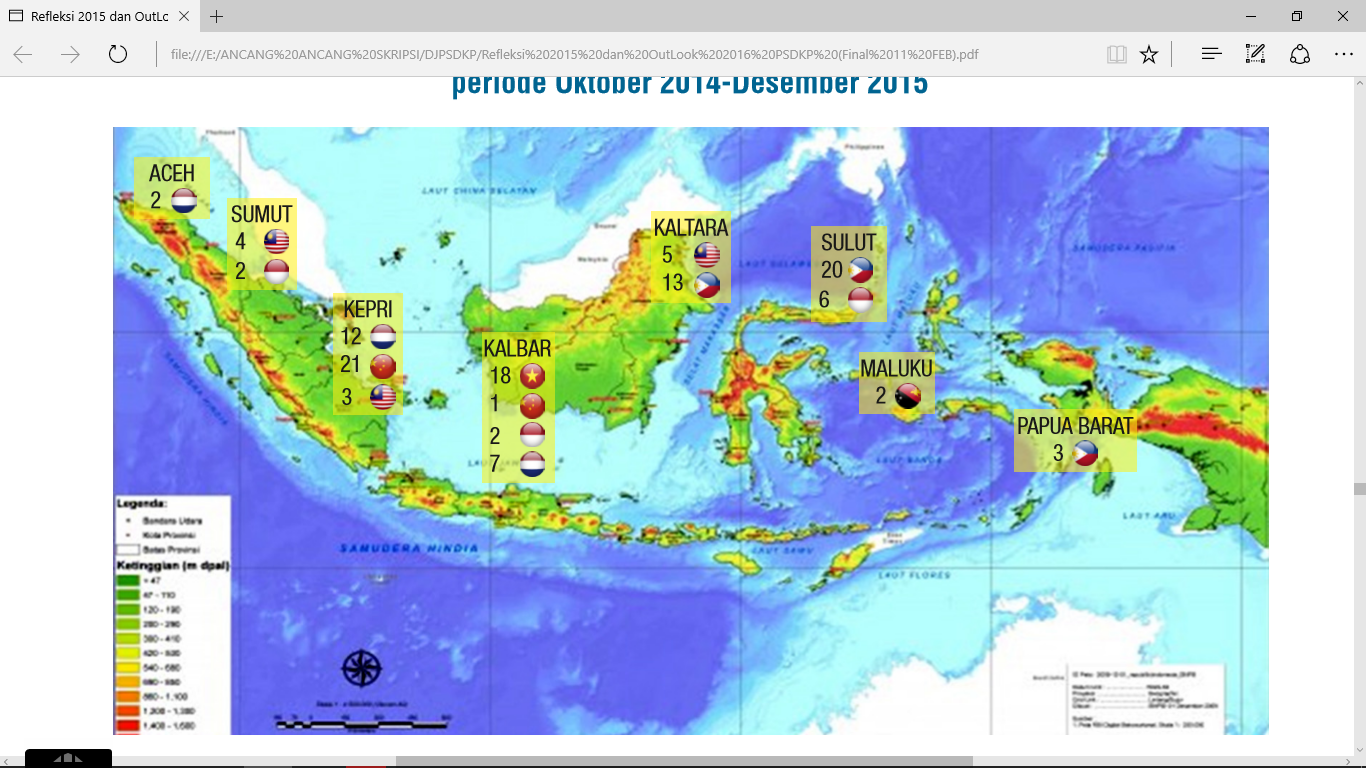
Namun demikian, Pemerintah harus terus mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* tersebut kepada Negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapal nelayannya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga.[[44]](#footnote-44)

kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku IUU *fishing.* Sejak Oktober tahun 2014 sampai Desember 2015, KKP Cq. Ditjen PSDKP beserta TNI AL dan POLRI telah menenggelamkan 121 Kapal yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI.[[45]](#footnote-45)

**Tabel 2.1 Penenggelaman Kapal Ikan Ilegal**



**Gambar 2.1 Lokasi Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* priode Oktober 2014-Desember 2015**



1. Nunung Mahmudah, Op.cit, hlm 79 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Arloka, Surabaya, 1994, hlm.234. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pius Abdulah, *Kamus Ilmiah Populer*, Ibid, hlm 174 [↑](#footnote-ref-3)
4. Tommy Sitohang, “Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* dan penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan”, Jurnal Keadilan Vol. 4, No. 2, Tahun 2005/2006, hlm 58 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nunung Mahmudah, Op Cit. Hlm 80. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kajian perikanan, “*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* menurut *RMFOs*”, diakses dari: http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html, pada tanggal 29 Maret 2016, pukul 14:59 WIB.  [↑](#footnote-ref-6)
7. Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm 134-135. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm 135 [↑](#footnote-ref-8)
9. Nunung Mahmudah, Op. Cit. 81 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm 82 [↑](#footnote-ref-11)
12. ibid [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hlm 82-83 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hlm 83 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm 85 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nunung Mahmudah, Ibid, hlm 65. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hlm 66 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm 67 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, hlm 67-68 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, hlm 68 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, hlm 69 [↑](#footnote-ref-22)
23. ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, hlm 70 [↑](#footnote-ref-24)
25. ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, hlm 71 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hlm 71-72 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid, hlm 72 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hlm 73 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hlm 75 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, hlm 75-77 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, hlm 77-78 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ajeng Dwi Pamili, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing* Oleh Kapal-Kapal Asing di Perairan Indonesia”, (skripsi Universitas Pembangunan Nasional, 2009), hlm jakarta [↑](#footnote-ref-34)
35. Analisis Data Pokok, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik, dan Informasi). [↑](#footnote-ref-35)
36. Yusuf Iswanto, “Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)”, Prosiding Seminar Nasionalmulti Disiplin Ilmu&Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis KesejahteraanRakyat, (Fakultas Hukum Universitas Maria Kudus). [↑](#footnote-ref-36)
37. ibid [↑](#footnote-ref-37)
38. ibid [↑](#footnote-ref-38)
39. ibid [↑](#footnote-ref-39)
40. ibid [↑](#footnote-ref-40)
41. ibid [↑](#footnote-ref-41)
42. ibid [↑](#footnote-ref-42)
43. ibid [↑](#footnote-ref-43)
44. ibid [↑](#footnote-ref-44)
45. Refleksi 2015 dan Outlook 2016: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (Jakarta: Plt Direktur Jenderal PSDKP), hlm 28 [↑](#footnote-ref-45)